

Panja DPRD Minta Penjelasan Aset ✓

KUBU RAYA, TRIBUN - Panitia Kerja (Panja) DPRD Kubu Raya terhadap pengelolaan keuangan Opini Tidak Wajar dari BPK telah menyelesaikan pembahasan mengenai permasalahan tersebut. Panja akan memberikan rekomendasi dengan membuat Raperda mengenai aset yang dianggap bermasalah dalam pengelolaan.

Ketua Panja, Suprpto ditemui usai rapat tertutup Panja di DPRD Kubu Raya,

Rabu (20/7) mengatakan Panja sudah selesai melakukan rapat bersama SKP dan akan dilakukan Rapat Paripurna pada Kamis (21/7) untuk penyampaian hasil Panja di DPRD Kubu Raya.

"Panja meminta semua penjelasan atas temuan BPK maka kami undang seluruh SKPD Pemerintah daerah serta BPN. Selain itu kita undang dari PLN dan Bank Kalbar terkait MoU dengan Pemkab Kubu Raya yang dianggap salah satu opini tidak

wajar," ungkap Suprpto.

Menurut Suprpto hasil audit temuan BPK memang dari 2009 dan 2010 mendapatkan opini tidak wajar dalam pengelolaan keuangan tetapi dalam sistem penganggaran sudah cukup baik.

"Cuma di sisi persentasi mengenai penanganan-penangan aset penyerahan ada permasalahan. Di antaranya penyerahan masalah aset dari kabupaten induk ke Kubu Raya sejak pemekaran," katanya. (isf)